

ABSTRAK

Permasalahan kesehatan jiwa termasuk salah satu masalah besar bagi kesehatan. Berdasarkan data profil Kesehatan tahun 2023, jumlah penderita gangguan jiwa di Kabupaten Banjarnegara sebanyak 2.697 orang. Penyembuhan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) sebagian besar berada di rumah. Oleh karena itu, faktor kesiapan keluarga menjadi faktor utama kesembuhan ODGJ. Pada pelaksanaan penanganan ODGJ khususnya dalam rehabilitasi berbasis keluarga belum ada koordinasi antara Dinsos dan Dinkes.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kendala komunikasi dalam pelaksanaan rehabilitasi ODGJ berbasis keluarga, menganalisis bentuk komunikasi yang selama ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial kepada keluarga ODGJ dan menganalisis manajemen komunikasi dinas sosial, dinas Kesehatan dan keluarga ODGJ dalam penanganan rehabilitasi sosial berbasis keluarga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, *Focus Group Discussion* (FGD) serta observasi. Informan pada penelitian ini sebanyak 8 orang yang terdiri dari 4 orang keluarga ODGJ, 1 orang dari Dinas Kesehatan, 1 orang dari Dinas Sosial, 1 orang petugas Kesehatan jiwa dan 1 orang Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala komunikasi dalam pelaksanaan rehabilitasi berbasis keluarga terletak pada kurangnya pemahaman dan kesiapan komunikasi keluarga dalam merawat ODGJ, yang menyebabkan kurang efektifnya pelaksanaan rehabilitasi di rumah. Pola komunikasi yang bersifat satu arah, minimnya umpan balik serta belum adanya sistem komunikasi yang terintegrasi antara pemerintah dan keluarga yang dapat menghambat alur informasi dan penanganan yang komprehensif.

Selain itu, berdasarkan pendekatan *Planning and Management Method* dari Cutlip, Center, dan Broom, Manajemen komunikasi Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial berbasis keluarga belum berjalan optimal. Meskipun masing-masing dinas telah melaksanakan tugas sesuai fungsi sektoralnya, komunikasi antar OPD masih bersifat insidental dan belum terstruktur dengan baik.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Rehabilitasi ODGJ, Manajemen Komunikasi

ABSTRACT

Mental health issues are among the major challenges in public health. Based on the 2023 Health Profile data, there are 2,697 individuals with mental disorders in Banjarnegara Regency. The recovery process for most individuals with mental disorders takes place at home, making family readiness a crucial factor in the success of rehabilitation. However, in the implementation of family-based rehabilitation, coordination between the Social Services Office and the Health Office has not yet been established.

This study aims to analyze communication barriers in the implementation of family-based rehabilitation for individuals with mental disorders, examine the forms of communication carried out by the Health Office and the Social Services Office to families, and analyze the communication management among the Social Services Office, Health Office, and families in handling family-based social rehabilitation.

The research employs a qualitative approach with a case study method. Data were collected through interviews, Focus Group Discussions (FGD), and observations. Informants in this study consisted of eight individuals, including four family members, one official from the Health Office, one official from the Social Services Office, one mental health officer, and one Social Worker.

The results show that communication barriers in implementing family-based rehabilitation are primarily due to the lack of understanding and communication readiness of families in providing care, resulting in less effective rehabilitation at home. One-way communication patterns, minimal feedback, and the absence of an integrated communication system between the government and families hinder the flow of information and comprehensive handling.

Furthermore, based on the Planning and Management Method approach by Cutlip, Center, and Broom, communication management by the Regional Government of Banjarnegara Regency in implementing family-based social rehabilitation has not been optimal. Although each agency has carried out its duties according to its sectoral functions, inter-agency communication (among local government organizations) remains incidental and lacks structured coordination.

Keywords: Local Government, Rehabilitation of People with Mental Disorders, Communication Management